

T E S I S

ASPEK KEADILAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Megister Hukum
Pada Program Studi Megister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh:

Novandi Dwi Putra

NPM: 22310019

**PRODI STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2024

TESIS

**ASPEK KEADILAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Diajukan oleh:

NOVANDI DWI PUTRA

NPM: 22310019

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal 21 Desember 2023

Oleh

Pembimbing I



Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

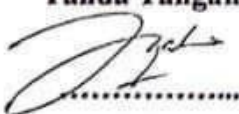
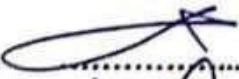

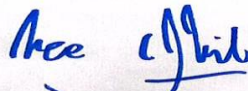

TESIS
ASPEK KEADILAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NOVANDI DWI PUTRA
NPM: 22310002

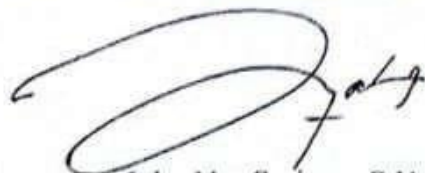
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 13 Januari 2024

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji	Tanda Tangan
Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.	Ketua 
Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum	Anggota 
Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H.	Anggota 
Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.	Anggota 
Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.	Anggota 

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister
Tanggal 13 Januari 2024

Ketua Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

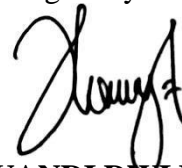
Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Sariono, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Dr. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
6. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing II yangtelah memberikan bimbingan dan arahan-arahan.
7. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberika dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.
8. Kepada kedua orang tua penulis, penulis yang memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini.

9. Kepada mahasiswa Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan 2022 yang bersama-sama memberika energi positif sehingga tesis ini terselesaikan.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 21 Desember 2023
Yang menyatakan,



NOVANDI DWI PUTRA
NPM 22310002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novandi Dwi Putra
NPM : 22310019
Alamat : Dsn. Banjarmlati RT 01 RW 04, Ds. Lengkong,
Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto
No. WA : 082232535730

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **“Aspek Keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplagerisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 21 Desember 2023
Yang menyatakan,



NOVANDI DWI PUTRA

NPM 22310019

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR... ..	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.	1
1.2 Rumusan Masalah.	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Kajian Teoritis	12
1.5.1 Kajian umum tentang Mahkamah Agung.....	12
1.5.2 Kajian umum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung.....	15
1.5.3 Kajian umum tentang Tujuan Hukum	20
1.5.4 Kajian umum tentang Pertimbangan Hakim	22
1.5.5 Kajian umum tentang Putusan Hakim	25
1.5.6 Kajian umum tentang Tindak Pidana	28
1.5.7 Kajian umum tentang Narkotika.....	30
1.6 Metode Penelitian.....	34
1.6.1 Jenis Penelitian... ..	34
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	35
1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	36
1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum	38
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	38
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis.....	39

BAB II KEDUDUKAN DAN KEKUATAN MENGIKAT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA	40
2.1 Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	40
2.2 Keberlakuan dan Kekuatan Mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung.....	44
2.3 Temuan dan kebaruan hukum terhadap penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.	53
BAB III ASPEK KEADILAN DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA	58
3.1 Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika berdasarkan SEMA dan Undang-Undang Narkotika	58
3.2 Tujuan Hukum penerapan SEMA terhadap penyelesaian perkara tindak pidana Narkotika	65
3.3 Aspek keadilan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 terhadap penyelesaian perkara tindak pidana narkotika.....	77
BAB IV PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Kajian hukum terhadap perkara tindak pidana narkotika sebenarnya sangatlah penting terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan hukum acara pidana. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 mengatur tentang hakim dapat memutus perkara tindak pidana narkotika diluar dakwaan dengan menyimpangi pidana minimum khusus terhadap pelaku penyalahguna narkotika. Menurut penulis hal ini bertentangan dengan Pasal 182 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan Hakim diharuskan memutus sesuai dakwaan dari Penuntut Umum sedangkan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut membolehkan hakim memberikan pertimbangan diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan adalah terkait kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung terhadap pemenuhan aspek tujuan hukum.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif dengan konsep metode pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus dengan analisis yang menitikberatkan pada teori hukum pidana dan peraturan hukum positif yang relevan dihubungkan dengan studi kasus yang ada. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, mengkaji dokumen, penelusuran internet, dan pengayaan literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kekuatan mengikat SEMA berlaku sebagai peraturan pedoman yang sifatnya internal bagi kalangan hakim serta dapat dijadikan acuan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika. Kesimpangsiuran bagi para Penegak Hukum antara lain Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Hakim itu sendiri mengenai aturan manakah yang harus ditaati sebagai pedoman penyelesaian perkara Narkotika otomatis berdampak pada aspek pemenuhan tujuan hukum yaitu aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : Aspek Keadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Tindak Pidana Narkotika, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Legal studies regarding narcotics crime cases are actually very important for the development of law in Indonesia, especially related to criminal procedural law. Apart from Law Number 35 of 2009 which regulates Narcotics, Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2015 regulates that judges can decide on narcotics crime cases outside of the indictment by deviating from specific minimum sentences for narcotics abusers. According to the author, this is contrary to Article 182 paragraph 4 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law which states that judges are required to decide according to the indictment of the Public Prosecutor, whereas the rules of the Supreme Court Circular Letter allow judges to give considerations outside of the Public Prosecutor's indictment by deviating from the provisions. special minimum sentence. Based on this, the problem formulated is related to the position and binding force of the Supreme Court Circular Letter regarding the fulfillment of aspects of legal objectives.

The research method used is a normative juridical method with the concept of the Law approach and Case Approach with analysis that focuses on criminal law theory and relevant positive legal regulations connected to existing case studies. Sources of legal materials include primary and secondary legal materials. Legal materials are collected by searching for statutory regulations, reviewing documents, internet searches, and enriching legal literature.

The research results show that the position and binding power of SEMA applies as an internal guiding regulation for judges and can be used as a reference in examining and deciding narcotics crime cases. Confusion for Law Enforcers, including Public Prosecutors, Legal Advisors and Judges themselves regarding which rules must be obeyed as guidelines for resolving Narcotics cases automatically has an impact on aspects of fulfilling legal objectives, namely aspects of justice, certainty and legal benefits.

Keywords : Aspects of Justice, Supreme Court Circular Letters, Narcotics Crimes, Judges' Considerations